

KIK
Per 06/01
3,50
P

SKRIPSI

EVA GLORIAWATI

**POLEMIK TERHADAP RENCANA PENCABUTAN
PP. NOMOR 10 TAHUN 1983
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**POLEMIK TERHADAP RENCANA PENCABUTAN
PP. NOMOR 10 TAHUN 1983
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN MEMENUHI SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Liliek Kamilah".

LILIEK KAMILAH, S.H.,M.HUM.

NIP. 130 531 799

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eva Gloriawati".

EVA GLORIAWATI

NIM. 039514106

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Berdasarkan PP Nomor 10 tahun 1983 Poligami dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:

- Dalam memori penjelasan PP 10/1983 PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang dan PNS wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan PNS diharuskan untuk memperoleh izin dahulu dari pejabat atasannya. Sedangkan PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari PNS.
- Izin tersebut menurut pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan memenuhi tiga syarat kumulatif.

Berdasarkan hukum Islam poligami dilakukan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Mampu berlaku adil (surat An Nisa ayat 3 dan ayat 129)
- Mampu memberi nafkah (surat An Nur ayat 33)
- Poligami dibatasi empat istri (surat An Nisa ayat 3)
- Larangan menghimpun dua istri yang bersaudara kandung (surat An Nisa ayat 23)

b. PP nomor 10 tahun 1983 adalah produk hukum siyasah yang terbuka untuk peninjauan perubahan dan penyempurnaan. Tetapi untuk saat sekarang

pencabutan terhadap peraturan tersebut kurang tepat untuk dilakukan karena beberapa peraturannya masih diperlukan. Kecuali dua ketentuan yang bertentangan dengan syariah Islam dan juga hukum positif yaitu:

- Adanya izin dari atasan;
- syarat bahwa PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat bagi PNS pria.

2. Saran

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 masih diperlukan dan tidak perlu dilakukan pencabutan secara menyeluruh. Sebaliknya hanya beberapa pasal saja yang perlu dicermati dan untuk kemudian dilakukan pengubahan ataupun pencabutan.
- b. Sebelum mencabut PP Nomor 10 tahun 1983, diperlukan suatu penjelasan yang lebih mendetail dari pemerintah. Usulan yang diajukan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Khofifah Indar Parawansa masih belum disertai penjelasan yang menyentuh esensi dari peraturan tersebut, seharusnya penjelasan yang terarah adalah merupakan prioritas reformasi. Sudah bukan rahasia lagi di masa Orde Baru suatu peraturan hukum berlaku menurut selera pemerintah.

